



**Siaran Pers**  
**Persatuan Petani Jambi (PPJ)**

**Pemerintah Harus Bertanggung Jawab atas:  
HILANGNYA TANAH RAKYAT JAMBI DI 5 KABUPATEN  
YANG DIRAMPAS PT WIRAKARYA SAKTI DAN PT RHM (SINARMAS)**

**H**ilangnya hak petani Jambi atas tanah seluas ± 41.779 Ha di 5 Kabupaten (*Bungo, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Timur dan Tanjab Barat*) berawal dari dikeluarkannya izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) oleh Menteri Kehutanan seluas 306.201 Ha kepada PT Wirakarya Sakti (WKS), dan seluas 51.260 Ha kepada PT Rimba Hutani Mas (RHM). Kedua perusahaan ini berada dibawah bendera perusahaan raksasa bernama **Sinarmas Forestry**.



PT WKS dan PT RHM beroperasi dengan cara **menggusur kebun-kebun milik petani, tanah dan hutan adat rakyat Jambi**. Tak cukup sampai disitu, perusahaan ini menambah lagi daftar dosa-dosanya dengan mencemari lingkungan: merubah lahan gambut menjadi tanaman monoculture (akasia & ekaliptus), mengairi kanal limbah ke perkampungan penduduk, menutup sungai-sungai alam, mencuri kayu dan membatat hutan alam sebagai sumber penghidupan rakyat Jambi. Daya rusak dari praktek rakus dan lapar tanah kedua perusahaan ini, dimasa depan akan menimbulkan krisis sosial, ekonomi dan ekologis yang merugikan masyarakat jambi secara luas.

Dari hasil identifikasi anggota PPJ, tercatat 14.536 Kepala keluarga (KK) yang tersebar di 5 Kabupaten yang menjadi korban dan terkena dampak kerugian, terutama akibat perampasan tanah yang dilakukan kedua perusahaan raksasa ini. **Jika dihitung rata-rata setiap KK yang dirugikan bisa menghasilkan uang sebesar Rp 1.000.000, per bulan dari hasil mengelola lahan seluas 41.779 Ha yang hilang tersebut, maka dalam setahun total kerugian bisa mencapai angka Rp 189.576.000.000, (189 milyar lebih). Jika dikalikan rata-rata KK telah kehilangan lahan selama 10 tahun, maka total kerugian bisa menembus angka Rp 2.274.912.000.000, (Dua triliun lebih). Sungguh sebuah angka yang pantastis, yang dapat melahirkan ribuan sarjana dari anak petani serta menjamin biaya kesehatan ribuan keluarga petani.**

Sejak tahun 1996 hingga beberapa tahun belakangan ini, terutama diawal-awal perusahaan mulai menggusur kebun-kebun, tanah dan hutan adat, tak pernah ada **"sosialisasi"**. Masyarakat korban telah berupaya untuk melarang dan mengajak mereka berunding. Alih-alih mau berunding, justru bersama aparaturn tentara, brimob dan preman bayaran, pihak perusahaan berlaku kasar, mengancam dan menteror masyarakat dengan tetap melakukan aktivitas pengusuran. Sekuat tenaga, masyarakat korban PT WKS dan PT RHM di 5 Kabupaten terus melakukan konsolidasi, satu persatu kelompok-kelompok tani menggabungkan diri kedalam organisasi massa Persatuan Petani Jambi (PPJ). **Hingga, pada tanggal 17 Maret 2008, anggota PPJ melakukan aksi besar-besaran yang melibatkan ± 15 ribu massa. Gubernur Jambi (H. Zulkifli Nurdin) saat itu berjanji akan segera memenuhi tuntutan anggota PPJ, dengan mengembalikan lahan seluas 41.779 Ha yang dirampas PT WKS dan PT RHM, dan akan**



Kebun milik warga Kuala Dasal – Tanjab Barat seluas ± 1.000 Ha yang dirampas PT RHM.



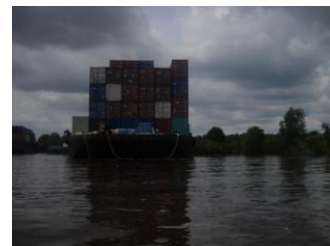
Kebun, tanah dan hutan adat warga Senyerang – Tanjab Barat seluas 7.224 Ha yang dirampas PT WKS.



Limbah pabrik LPPPI Tebing – Tanjab Barat menggenangi rumah dan menyebabkan ternak warga Senyerang banyak yang mati.



Kebun-kebun kelapa warga Senyerang – Tanjab Barat yang mati diserang kumbang saat PT WKS melakukan panen akasia.



Aktivitas pengangkutan pulp and paper dan tissu mengakibatkan rusaknya sungai Pengabuan dan mengikis tebing-tebing perkampungan yang berada di sepanjang bantaran sungai Pengabuan – Tanjab Barat.

menambah lagi lahan seluas 41.000 Ha untuk petani Jambi dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Gubernur Jambi langsung membentuk **Tim Verifikasi** yang bekerja khusus mengidentifikasi areal kebun, tanah dan hutan adat yang dirampas PT WKS dan RHM. Kenyataannya, Tim Verifikasi tidak bekerja efektif dengan alasan keterbatasan dana dan waktu. **Temuan tim verifikasi yang seadanya** tersebut, kemudian direkomendasikan ke Kementerian Kehutanan. Alhasil, harapan ribuan masyarakat korban menjadi punah karena janji manis dan bujukan sang Gubernur berkuasa. Dilain pihak, kebijakan Kementerian Kehutanan melalui Dirjend Bina Usaha Tanaman Kehutanan (BUTK) menambah kekecewaan masyarakat korban. Dirjend BUTK menyatakan, bahwa lahan seluas 41.000 Ha yang akan dikembalikan mengacu pada hasil survey LSI, yang nyata-nyata merupakan kebun masyarakat dan diluar areal yang dirampas PT WKS dan PT RHM.

Masyarakat korban menolak keras atas keputusan tersebut. Sepanjang tahun 2010, masyarakat korban terus berjuang dengan melakukan rentetan aksi yang dilakukan di Kota Jambi dan di lapangan. Aksi lapangan tepatnya dilakukan di 4 (empat) titik pital jalur transportasi PT WKS dan RHM: *Simpang Abadi, Kuala Dasal, Simpang Km 73 dan memblokade Sungai Pengabuan*. Aksi damai masyarakat korban, lagi-lagi dibalas dengan tindakan brutal aparat brimob bayaran pihak perusahaan; **Ibu-ibu dan anak-anak yang ikut aksi dinjak, dintimidasi dan diteror. Bahkan, seorang petani asal Kelurahan Senyerang – Tanjab Barat meninggal dunia akibat tembakan Brimob bayaran PT WSK, PT RHM dan PT LPPPI milik Sinarmas Group pada 11 November 2010 lalu. Hingga kini pelaku kasus penembakan tersebut belum dihukum dan diadili.**

Sampai saat ini tak tampak upaya serius dan niat baik dari pemerintah dan pihak perusahaan. Kendati demikian, kami masyarakat korban di 5 Kabupaten yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi tak akan patah semangat, dan hari ini kembali menuntut pemerintah (khususnya Menteri Kehutanan) untuk :

1. Segera mengembalikan lahan seluas 41.779 Ha yang dirampas PT WKS dan PT RHM kepada anggota PPI yang menjadi korban;
2. Segera mengusut dalang dan menindak tegas pelaku penembakan (Brimob) yang mengakibatkan meninggalnya anggota PPI di Kelurahan Senyerang;
3. Menjamin tidak ada tindakan kekerasan, teror dan intimidasi dari Aparat Kepolisian, TNI dan Preman bayaran PT WKS dan PT RHM;
4. Memberikan sanksi tegas kepada PT WKS dan PT RHM yang telah banyak melakukan praktek pelanggaran HAM, menimbulkan konflik sosial, merugikan masyarakat, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Telah lama kami menaruh harapan dan menunggu keadilan atas lahan kami yang dirampas PT WKS dan PT RHM. Ini demi kesejahteraan dan biaya pendidikan anak-anak kami. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka benarlah anggapan bahwa Perusahaan dan Pemerintah berselingkuh dan menari diatas penderitaan rakyat, tidak memiliki komitmen menjalankan agenda Reforma Agraria, inkonsistensi dan mengangkangi amanah UUPA No. 5 tahun 1960, dan merupakan pelaku pelanggaran HAM dengan membiarkan rakyat hidup dalam kemelaratan. **DOSA !**

Jambi, 2 Mei 2011,

**Aidil Putra**  
Ketua PPI



Aksi dan rembuk tani anggota PPI di lapangan kantor Gubernur Jambi pada 17 Maret 2008.



Aksi PPI di Kota Jambi pada 17 Maret 2010, menuntut dikembalikannya lahan yang dirampas PT WKS dan RHM.



Aksi reclaiming petani Senyerang – Tanjab Barat diatas lahan seluas 7.224 Ha yang dirampas PT WKS.



Kunjungan Asisten II Gubernur Jambi di Kelurahan Senyerang pada 20 November 2011. Satu janji kedepan 3000 lebih keluarga petani yang kehilangan lahan seluas 7.224 Ha dengan skema kemitraan yang tak ditepati.



Warga dan ibu-ibu Kelurahan Senyerang menaruh harapan atas janji Asisten II Gubernur Jambi.